

PENGAWASAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

(Studi di Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RENDY RAMADHAN

NIM. 115010107113002



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada :

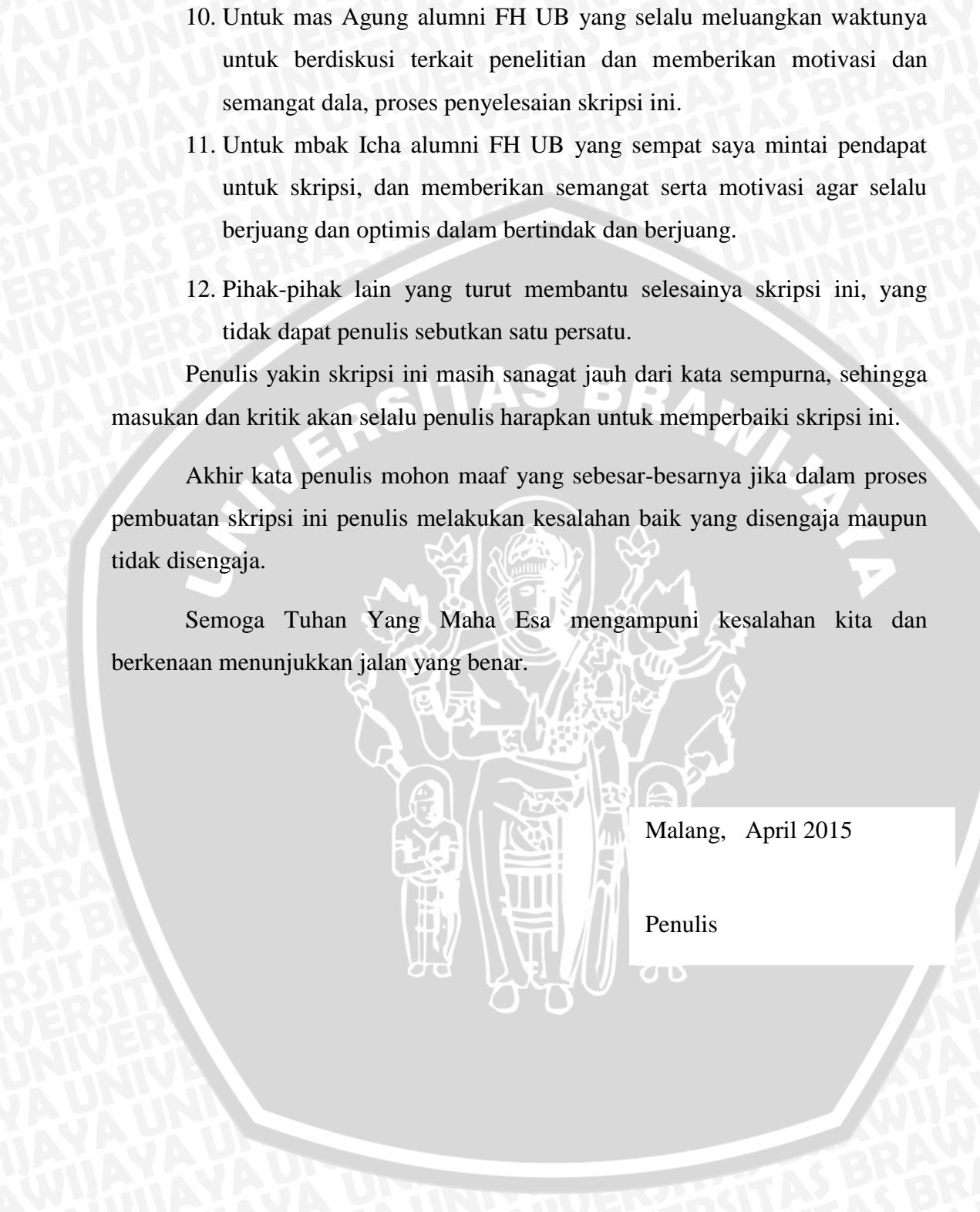
1. Allah SWT karena berkat atas nikmatNya berupa rahmat, hidayah dan inayahNya penulis masih diberi kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh umat muslim di dunia dan menjadi inspirasi dan panutan dari saya selama hidup hingga kelak nanti.
3. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa sampai dengan saat ini dan merupakan motivasi terbesar saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai,tanpa mereka berdua saya bukan apa-apa dan karena mereka semangat ini tetap terjaga.
4. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Ibu Lucky Endrawati, SH. MH selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum.
6. Ibu Herlin Wijayati, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
7. Terima kasih peneliti sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Arif Zainudin, SH. M.Hum yang selalu memberikan bimbingan kepada saya sehingga skripsi ini bisa peneliti selesaikan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang bersedia mengajar dan memberikan ilmu dengan datang mengajar ke Kampus IV Kediri.
9. Terima kasih juga kepada Bapak Dahlan dosen Hukum Pemerintahan Daerah yang meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan peneliti.

10. Untuk mas Agung alumni FH UB yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait penelitian dan memberikan motivasi dan semangat dala, proses penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk mbak Icha alumni FH UB yang sempat saya mintai pendapat untuk skripsi, dan memberikan semangat serta motivasi agar selalu berjuang dan optimis dalam bertindak dan berjuang.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sanagat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenaan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, April 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Ringkasan.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Pemerintahan Daerah .....	15
1. Pemerintah Daerah .....	15
2. Perangkat Daerah.....	29
B. Kajian Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	20
1. Pemerintah Desa .....	22
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	23
3. Musyawarah Desa.....	24
C. Kajian Umum Tentang Peraturan Desa.....	25
1. Peraturan Desa.....	25
2. Pembentukan Peraturan Desa .....	26
D. Kajian Umum Tentang Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa.....	30
E. Kajian Umum Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	39
D. Jenis Data dan Sumber Data	
1. Jenis Data.....	39
2. Sumber Data .....	41

E. Teknik Memperoleh Data .....	42
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	
1. Populasi .....	43
2. Sampel .....	43
3. Teknik Sampling .....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang .....	45
B. Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Sesuai Dengan Peraturan Perundang- undangan	
1. Pelaksanaan Pengawasan Bagian Hukum Sesuai Peraturan Perundang- undangan.....	48
2. Kendala Yang Dihadapi Bagian Hukum Dalam Melaksanakan Pengawasan Pembentukan Peraturan Desa .....	62
C. Pengawasan Pembentukan Peraturan Desa Yang Optimal Dan Efektif .....	74

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1. Dasar Hukum Bagian Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Saat Berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.....	51
Tabel 2. Dasar Hukum Bagian Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Saat Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	56
Tabel 3. Peraturan Desa yang Dibuat Selama Tahun 2014.....	67
Tabel 4. Hasil Wawancara dari Sampel Desa Terkait dengan Proses Penyusunan Peraturan Desa .....	73



**DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1. Kepadatan Penduduk Tahun 2009 ..... 48

Gambar 2. Alur Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa ..... 83



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Dari Desa
3. Surat Keterangan Plagiasi

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013
2. Surat Keputusan Bupati Jombang Tentang Tim Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2012



## RINGKASAN

Muhammad Rendy Ramadhan, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015, PENGAWASAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI KABUPATEN JOMBANG), Arif Zainudin, SH. M.Hum.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh pengalaman peneliti ketika melaksanakan Praktek Kerja Lapang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, melihat beberapa kali perangkat desa datang ke Bagian Hukum untuk meminta nomor Peraturan Desa Sehingga muncul pertanyaan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terhadap proses pembentukan Peraturan Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bagian Hukum Kabupaten Jombang terhadap pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana bentuk pengawasan pembentukan Peraturan Desa agar lebih optimal dan efektif?

Menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer, dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder hasil penelitian dan dideskripsikan sesuai dengan undang-undang, kemudian menarik kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan tentang pengawasan dalam pembentukan Peraturan Desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki 2 macam yakni berupa pengawasan dan pembinaan yang bisa berupa (1) bagian hukum merupakan salah satu anggota Tim Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, (2) melakukan pembinaan berupa pelaksanaan agenda Bimbingan Teknis terkait penyusunan Peraturan Desa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum sudah sesuai dengan Pasal 115 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 84 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, serta Pasal 66 dan 70 Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tupoksi Setda. Dalam pelaksanaannya masih terdapat oleh kendala yakni (1) sumber daya manusia di bagian hukum, (2) anggaran dari Pemerintah Kabupaten yang minim, (3) bentuk pengawasan yang masih belum tertata rapi. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi untuk kedepannya adalah (1) menerbitkan buku pedoman penyusunan Peraturan Desa, (2) program konsultasi hukum, (2) pembinaan berupa pelatihan penyusunan Perdes. Untuk saran dari peneliti bagi Pemerintah Kabupaten agar lebih konsisten dan serius dalam melaksanakan pengawasan baik secara preventif maupun represif.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembentukan Peraturan Desa, Bagian Hukum

## SUMMARY

Muhammad Rendy Ramadhan, Constitutional Law Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2015, The Supervision Of The Secretariat Of The Law In The Process Of Establishment Of Rule Villages (Study in Jombang District), Arif Zainudin, SH. M. Hum.

In this thesis, the researchers raised the problem of the legal section of the Secretariat of The Supervision in the process of formation of the Regulation of the village. The theme of the event will choice by the experience of researchers when conducting Field work practice in the legal secretariat, saw several times Councilor coming to the Legal Department to request a number of village Regulations so that it appears the question what kind of control do the legal secretariat of The process of formation of the regulations of the village.

This thesis raises issues of formulation: (1) how the supervision of the Legal Department Jombang District to the formation of village regulations based on laws and regulations? (2) how of oversight of the establishment of the rule of the village to be more optimal and effective?

This thesis using methods empirical juridical method of the juridical with sociological approach. The primary data source, and the secondary researchers will be analyzed using descriptive qualitative analysis techniques by combining primary and secondary data research results and described in accordance with the law, and then draw conclusions and suggestions according to the problems of the research on supervision in the formation of rules of the village.

The researchers get answers to existing problems that the supervision carried out by the legal secretariat has 2 kinds, i.e. in the form of supervision and coaching can be either (1) the Legal Department is one of the members of the evaluation team and the clarification of the Rules of the village, (2) perform a execution of coaching agendas technical guidance related to drafting regulations for the village. However, in practice there are still constraints and problems. The supervision carried out by The Law is in compliance with Article 115 letters b and e Act No. 6 by 2014 about Village, article 84 PP number 43 by 2014 about regulations implementing the Act the village, as well as Article 66 and 70 Regulation Regent Jombang No. 2 2015 about Basic Tasks And Functions of the Secretariat of the Jombang Region. In practice there is still by the constraints that (1) the human resources on the Legal Department, (2) the budget of the District Government are minimal, (3) a form of supervision that has still not arranged neatly. So the researchers provide recommendations for the future is to (1) publish the manual preparation of Regulations of the village, (2) the legal consultation progam, (2) coaching in the form of training preparation regulations of village. For advice from researchers for the County Government to make it more consistent and serious in exercising oversight of both preventive and repressive.

**Keywords :** Supervision, Establishment Of Rule Villages, Secretariat Of The Law

